



# **KEBERLANJUTAN KOMUNISME di TIONGKOK**

SEBUAH PENDEKATAN SOSIOLOGI POLITIK

Pengantar:

Prof. M. Mas'ud Said, PhD  
Mr. Gaudi Khing

Tonny Dian Effendi

  
**BUKU**  
litera





"Refleksi dari buku ini cukup jelas, bahwa kita tidak perlu mengorbankan atau mengijonkan jati diri dengan mengikis nilai luhur hanya untuk menggapai sukses orang lain. Refleksi akademis dari studi ini dapat dikatakan bahwa teori-teori umum yang Western Centered ternyata harus mengalami revisi kembali, terutama ketika ada data dan fakta-fakta baru terkuak, yang secara akademis membuat reorientasi metode dan kesimpulan ilmiah yang terlalu umum. Dunia ilmiah bergerak kearahnya. Jadi diperlukan pembaharuan pemikiran mengenai ilmu pengetahuan social dan ekonomi dan ilmu politik pada umumnya"

**Prof. M. Mas'ud Said, PhD.**

*Asisten Staf Khusus Presiden RI, Bidang Otonomi Daerah dan Pembangunan Daerah.*



"Setidaknya, Republik Rakyat Tiongkok telah berhasil menunjukkan sebuah model yang berbeda dari yang lain. Model sebuah Negara dengan dua sistem yang secara teoritis berada dalam jalur yang berbeda. Namun tentu saja, akan ada katalisator yang mendamaikan dua teori ini dalam penerapannya, yaitu kelompok cendekiawan dan ilmuwan, atau disebut dengan kelompok intelektual. Tulisan dalam buku ini akan memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kelompok intelektual di Tiongkok sangat berpengaruh kepada perubahan, dalam hal ini bukan pada saat modern saat ini, namun telah terjadi dan dimulai sejak ribuan tahun yang lalu di Tiongkok"

**Mr. Gaudi Khing**

*Senior Advisor, United States Asia Chambers of Commerce*



**Tonny Dian Effendi** adalah Pengajar di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia. Sebelumnya pernah menjadi Peneliti Tamu pada Japan Institute of International Affairs (2009-2010) dan peserta Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Young Leader - Pacific Forum (2012). Saat ini (2013) juga menjadi peneliti pada program Sumitro Fellows Program, United States - Indonesia Society (USINDO) dan juga pada program Sumitomo Grant for Japan-related Research Projects.



Minggiran MJ II/1378, RT 63/17  
Kel. Suryodiningratan, Mantrijeron Jogjakarta  
email : bukulitera@gmail.com  
phone : 0274 388895, 08179407446

ISBN 978-602-7636-36-1





Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KdT)  
KEBERLANJUTAN KOMUNISME DI TIONGKOK:  
Sebuah Pendekatan Sosiologi Politik  
© Tonny Dian Effendi

*All rights reserved*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang, dilarang memperbanyak sebagian  
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama, Oktober 2012

halaman xviii + 164 ; 15.5 x 23.5 cm

ISBN : 978-602-7636-25-5

Penulis : Tonny Dian Effendi

Desain Cover :Mapa

Tata Letak : Mapa

Diterbitkan oleh

Buku Litera

Minggiran MJ II/ 1378, RT 63/17

Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta.

Telp. 0274-8270844,

e-mail: bukulitera@gmail.com, purnamacd@gmail.com

# POLITIK DI NEGERI TIRAI BAMBU

**Sebuah Analisa Sosiologi Politik**



**TONNY DIAN EFFENDI**

# **POLITIK DI NEGERI TIRAI BAMBU**

**Sebuah Analisa Sosiologi Politik**

## **PENGANTAR**

Profesor M. Mas'ud Said, PhD (Guru Besar FISIP UMM)

Gaudi Khing (United States Asia Chambers of COMMERCE)



Perpustakaan Nasional : Katalog dalam Terbitan (KdT)  
POLITIK DI NEGERI TIRAI BAMBU:  
Sebuah Analisa Sosiologi Politik  
© Tonny Dian Effendi

*All rights reserved*

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang, dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan Pertama, Oktober 2012

halaman xviii + 164 ; 15.5 x 23.5 cm

ISBN : 978-602-7636-25-5

Penulis : Tonny Dian Effendi

Editor:

Desain Cover :Mapa

Tata Letak : Mapa

**Diterbitkan oleh**

Buku Litera

Minggiran MJ II/ 1378, RT 63/17

Suryodiningratan, Mantrijeron, Yogyakarta.

Telp. 0274-8270844,

e-mail: bukulitera@gmail.com, purnamacd@gmail.com

# PENGANTAR

Prof. M. Mas'ud Said, PhD

Sejak jaman dahulu sampai saat ini, orang telah merasakan ada nilai besar (*high values*) yang fenomenal di Tiongkok. Ditilik dari perspektif studi ekonomi politik (*political economy*) dan teori-teori pembangunan (*development theories*) misalnya, kasus Tiongkok oleh para peneliti senior sering dikecualikan. Mengapa? Sebagian terbesar yakin, bahwa kalau ingin sukses, besar dan berjaya, maka pranata sosial politik dan pranata ekonomi harus seperti di Barat.

Seakan-akan, ideologi yang dianggap paling mujarab, paling pantas, paling cocok untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bangsa haruslah dengan mekanisme pasar dan kebebasan individu. Pesan akademik dan moral dalam hubungan internasional yang terkandung dalam beberapa studi dan buku ajar seakan akan “sebaiknya dunia ini bersama sama Kapitalis, bahkan kalau perlu, negara negara di Asia-pun harus Kapitalis dari mulai kulturenya, strukturnya maupun ideologi negaranya harus Kapitalis bila tidak ingin miskin terus”. Hubungan antar manusia-pun harus mengikuti pola hubungan kebebasan dan individualisme. Sebagian terbesar peneliti dan penulis buku ekonomi dan pembangunan telah terjerembab pada paradigma yang baku Eropa dan Amerika sentris.

Asia memiliki jati dirinya sendiri. Asia muncul dengan basisn nilainya yang luhur, dengan demikian dengan *Asian culture* adalah modal utama yang paling *fit* dan paling relevan untuk memulai dan melanjutkan pembangunan di Asia. Nilai nilai seperti *pantas, cukup, sahaja, hemat* merupakan nilai keluarga yang mengakar dan menjadi jiwa dari bangsa Asia pada umumnya.



Buku yang tersaji ini adalah studi panjang mengenai nilai-nilai sosial dan nilai politik di Tiongkok yang unik (*distinctive*). Ditulis oleh ilmuwan muda yang memiliki masa depan.

Pesan umum yang terkandung dalam studi ini ialah *Pertama* bahwa konsep revolusi di Tiongkok telah muncul sejak ribuan tahun lalu, bukan terjadi hanya pada tahun 1911 ketika sistem monarkhi digantikan oleh sistem republik dengan kemenangan Dr. Sun Yat Sen melalui partai nasionalis Kuo Mintang. Ini mengeliminasi atau memperbaharui persepsi bahwa revolusi hanya terjadi saat itu. Yang membedakan adalah bahwa pada revolusi dimasa lalu hanya menggantikan rezimnya, bukan pada sistem.

*Kedua* bahwa anggapan Tiongkok tidak berubah dan terlalu lamban *evolutive* ternyata terbukti sebaliknya. Tiongkok adalah negara yang bisa menggabungkan nilai-nilai yang dianggap lama, berbasis tradisi dengan nilai-nilai baru termasuk dalam perdagangan, industri, investasi moneter. Di bidang ekonomi, Tiongkok sekarang mengadopsi nilai persaingan dan berpacu dengan negara Kapitalisme tanpa menghilangkan peran negara. Jadi secara walaupun ia disebut Komunisme, tapi ia adopsi pemilu. Ia adopsi Kapitalisme tapi Kapitalisme ala Tiongkok yang memodifikasi nilai internasional pada umumnya namun berbasis Tiongkok.

*Ketiga*, buku ini menjadi referensi yang baik tentang beberapa hal antara lain sejarah Tiongkok, lapisan masyarakat di Tiongkok, dan juga bagaimana sejarah kehidupan politiknya. Dari buku ini kita juga belajar mengenai bagaimana perpaduan nilai-nilai lama dan baru yang sinergis dan menguatkan bukan melemahkan. Dengan kata lain ada sihir Tiongkok melalui penguatan dan pelanjutan nilai-nilai dalam alam yang bergerak dan berubah. Nilai utamanya ialah mengutamakan kebersamaan, bukan individualistis, sebagaimana pesan presiden Tiongkok Hu Jintao tahun 2007 tentang delapan kehormatan dan pantangan masyarakat Tiongkok.

1. *Love the country, do it no harm*
2. *Serve the people, do not disservice*
3. *Follow science, discard ignorance*

4. *Be dilligent, no indolent*
5. *Be united, help each other and make no gains at someone else expense*
6. *Be honest and trustworthy, do not spend ethnics for profits*
7. *Be disciplined and law-abiding, not chaotic and lawness*
8. *Live plainly, struggle hard and do not wallow in luxuries and pleasure*

Di bidang industri, perdagangan dan moneter aktor utamanya ekonomi Tiongkok bukanlah individu dan perusahaan swasta murni namun gerakan ekonomi yang diprakarsasi, didorong dan didukung oleh *state actors* yaitu BUMN dan perusahaan swasta dengan kontrol negara. Rakyat diberi modal oleh pemerintah yang dengan modal itu sistem *state control* masih ada.

Penting diketahui bahwa dalam masyarakat Tiongkok kuno (bahkan sampai sekarang), ikatan klan atau komunitas kekeluargaan memegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi politik di Tiongkok. Desa-desa sering dinamakan sesuai dengan nama klan yang khusus berdiam atau berkuasa di situ. Sebagai konsekuensinya. Pemerintahan patrimonial dari atas bertemu dengan pengaruh klan yang kuat dari bawah. Jadi, di Tiongkok, pengaruh klan dipertahankan dan tumbuh menjadi imbalan bagi hak-hak prerogatif penguasa.

Selain klan, ikatan lain yang menyatukan warga Tiongkok kuno ialah ajaran Konfusianisme yang telah menjadi ideologi negara dan mendominasi kehidupan intelektual selama berabad-abad. Bahkan, pengetahuan akan ajaran Konfusius menjadi salah satu materi pelajaran dalam *development studies* di berbagai perruan tinggi ternama di dunia. Nilai dalam Konfusianisme ialah kesetiaan dan sikap hormat kepada leluhur, kewajiban berbuat baik secara hierarkhis, serta keharusan untuk rajin dan tekun belajar dan bekerja.

Ajaran Konfusius dengan demikian menjadi etika dalam pergaulan kehidupan. Dalam masyarakat Tiongkok, usaha mencapai kemakmuran tidaklah semata-mata diarahkan kepada kemakmuran anggota-anggota keluarga seperti ayah, ibu, dan saudara kandung, namun harus mencakup seluruh anggota

keluarga besar klan. Termasuk diantaranya saudara sepupu, paman bibi, dan seluruh kerabat lainnya.

Refleksi dari buku ini cukup jelas bahwa kita tidak perlu mengorbankan atau mengijonkan jati diri dengan mengikis nilai nilai luhur hanya untuk menggapai sukses orang lain. Refleksi akademik dari studi ini dapat dikatakan bahwa teori-teori umum yang *Western centered* ternyata harus mengalami revisi kembali, terutama ketika ada data dan fakta-fakta baru terkuak, yang secara akademis membuat reorientasi metode dan kesimpulan kesimpulan ilmiah yang terlalu umum. Dunia ilmiah terus bergerak arahnya. Jadi diperlukan pembaharuan pemikiran mengenai ilmu pemnegtahuan sosial dan ekonomi dan ilmu politik pada umumnya. Selanjutnya kajian analisis sosiologi politik sebagaimana yang dipakai dalam buku dan penelitian ini sangat membantu sebagai *standard of view* dalam memahami berbagai fenomena dalam dunia hubungan internasional.

Buku ini, membawa kesadaran baru bahwa dosen muda, peneliti muda seperti saudara Tonny Dian Effendi ini bukan saja memiliki potensi bagus, namun kalau didorong dan didukung hasil karya mereka jauh lebih bagus dari yang saya sendiri duga.

Saya ingin mengucapkan selamat kepada Tonny Dian Effendi dengan antusiasme dan semangat dan kerja kerasnya menghasilkan buku yang layak dibaca oleh akademisi, peneliti maupun bahkan oleh praktisi politik dan ekonomi khususnya yang berlatar belakang hubungan internasional.

Mudah-mudahan buku ini memberi manfaat

Malang, 8 Agustus 2011

**Prof. M. Mas'ud Said, Ph.D**



# PENGANTAR

**Go Hwie Khing**

Senior Advisor, United States Asia Chamber and Commerce

Tiongkok adalah sebuah negara yang memiliki peradaban tinggi yang telah berumur ribuan tahun yang masih eksis dan berkelanjutan sampai sekarang. Pengaruh peradaban Tiongkok dapat kita lihat dan amati di berbagai negara terutama di kawasan Asia Timur. Tiongkok juga memiliki sejarah panjang yang sangat unik dan menarik untuk dikaji. Tulisan dari Tonny Dian Effendi ini sebenarnya adalah sebuah tulisan yang mencoba menggabungkan sisi Sejarah, Sosiologi dan Politik. Hal ini sangat penting karena akan menggambarkan sebuah rangkaian peristiwa yang tidak hanya menampilkan setting dan perilaku, namun lebih dari itu juga arti dibalik peristiwa-peristiwa itu secara sosiologi politik yang akan berpengaruh juga pada Tiongkok yang kita kenal saat ini.

Buku-buku yang beredar dengan tema Tiongkok saat ini banyak menyoroti tentang perkembangan ekonomi Tiongkok yang mengguncang dunia. Tiongkok yang pada era tahun 1950-1960an lebih banyak dikenal dengan negara Komunis yang menjadi target *containment policy* Amerika Serikat, sekaligus juga menjadi ancaman bagi blok Barat, pada saat ini muncul dengan wajah yang berbeda. Sejak Reformasi Ekonomi yang dijalankan oleh Deng Xiao Ping pada tahun 1978, Tiongkok telah berkembang pesat secara ekonomi dan teknologi. Kemajuan ekonomi Tiongkok ini semakin terasa terutama pada akhir tahun 1990an ketika negara-negara di kawasan Asia Tenggara terkena krisis ekonomi. Tiongkok kemudian semakin “bermain” dikawasan dengan *peaceful co-existence*-nya, yaitu prinsip hidup berdampingan secara damai, utamanya dengan negara-negara tetangganya. Hal tersebut disampaikan oleh para pejabat Tiongkok dalam menjelaskan keterkaitan antara kemajuan ekonomi dan hubungan internasional Tiongkok, untuk mengurangi

kekhawatiran terhadap potensi ancaman Tiongkok yang bersumber dari kemajuan ekonominya tersebut.

Memang tidak dapat kita pungkiri bahwa kemajuan ekonomi Tiongkok begitu pesat. Bahkan beberapa ahli berpendapat, Tiongkok akan menggantikan posisi Jepang sebagai kekuatan ekonomi terbesar kedua didunia dan sedang dalam perjalanan untuk menggeser posisi Amerika Serikat sebagai kekuatan ekonomi nomor satu dunia. Jika ada negara lain masuk *World Trade Organisation* (WTO) tidak mendapat manfaat yang menguntungkan negerinya karena tidak siap bermain, masuknya Tiongkok dalam organisasi perdagangan dunia, *World Trade Organisation* (WTO) juga semakin memantapkan posisi Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi besar dunia. Disisi lain, jika pada masa tahun 1990an, beberapa ahli ekonomi begitu terpukau dengan kemajuan beberapa negara dikawasan Asia Timur dan menyebutnya sebagai *Asia's economic miracle* dengan munculnya *New Industrial Countries*, maka pada saat ini Tiongkok juga berada pada posisi terdepan bersama dengan negara-negara yang sedang bangkit ekonominya yaitu Brazil, India dan Rusia. Kelompok ini sering disebut sebagai BRIC (Brazil, Rusia, India dan Tiongkok).

Namun, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana Tiongkok mampu membangun ekonominya dengan sedemikian besarnya, sementara disisi lain Tiongkok masih mempertahankan sistem Komunisme pada politiknya? Tesis dari kelompok Penganjur Kapitalisme menunjukkan bahwa sistem demokrasi liberal akan berkorelasi positif dengan kemajuan ekonomi. Hal ini ditunjukkan dengan pengalaman negara industri di Eropa Barat dan beberapa penganutnya di Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Atau dengan kata lain, untuk membangun perekonomian yang ditunjukkan dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka sistem politiknya harus mendukung, dan pada konteks itulah demokrasi liberal menjadi pasangan yang cocok. Lalu bagaimana dengan Republik Rakyat Tiongkok? Stabilitas politik memang sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, berbagai pemerintah diberbagai negara dunia menginginkan stabilitas politik untuk mendukung pembangunan ekonominya. Demikian

pula dengan Republik Rakyat Tiongkok. Republik Rakyat Tiongkok juga membangun demokrasinya berdasarkan Komunisme yang mereka yakini juga dapat menumbuhkan stabilitas politik dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Nampaknya, hal ini menjadi aneh karena adanya pertentangan dengan prinsip Komunisme itu sendiri, sementara secara nyata Republik Rakyat Tiongkok menerapkan liberalisasi ekonomi. Disitulah sebenarnya keunikan Tiongkok, yaitu menjalankan sebuah negara dengan dua sistem sekaligus.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kemudian pemerintah Republik Rakyat Tiongkok yang Komunis, mampu menjalankan ekonominya dengan cara Kapitalis? Ada dua hal penting yang dapat kita amati. *Pertama*, perkembangan globalisasi telah menembus batas-batas negara dan tidak pandang bulu, sistem politik apa yang berlaku dinegara-negara tersebut. Sebagai tolak ukurnya, kita dapat melihat bagaimana *Transnational Corporations* (TNC) dunia yang beredar dan memiliki cabang di banyak negara dengan latar belakang politik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam konteks globalisasi ini, tidak ada negara yang dapat menghindar, termasuk Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Globalisasi ini menjadi inspirasi Tiongkok untuk maju dan menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada. *Kedua*, apapun alasan dari faktor pertama tadi, namun sebenarnya hal yang paling pokok adalah kepiawaian para elit politik di Partai Komunis Tiongkok (PKT) dalam melakukan penyesuaian dengan perkembangan ini. Elit PKT berhasil menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi yang diawali dengan reformasi ekonomi dan membuat daerah-daerah khusus dipantai timur sebagai daerah industri dan investasi. Sebagai dampak globalisasi, pemerintah Republik Rakyat Tiongkok juga meletakkan teknologi dan informasi sebagai salah satu pengembangan utamanya sehingga dalam beberapa tahun Tiongkok telah berhasil memiliki beberapa perusahaan yang beroperasi diberbagai belahan dunia.

Perkembangan politik di Republik Rakyat Tiongkok itu sendiri sangat menarik. Tiongkok yang selama ribuan tahun berbentuk monarkhi absolut kemudian berevolusi menjadi negara republik



modern pada tahun 1911. Negara yang dipelopori oleh Dr. Sun Yat Sen ini hanya berkembang selama tiga puluhan tahun dan kemudian muncullah revolusi Komunisme dan berdirilah Republik Rakyat Tiongkok pada tahun 1949. Secara umum, Tiongkok telah mengalami beberapa kali pergantian sistem politik. Perkembangan politik ini juga telah membawa arti dan budaya politik di Tiongkok. Dalam perjalanan kekuasaan PKT di Tiongkok sendiri-pun, tidak tunggal dalam artian bukan tidak ada perubahan. Dalam perjalanannya politik Tiongkok mengalami pasang surut dan perebutan kekuasaan. Hanya saja, dalam perkembangannya, masyarakat Tiongkok, pada cendekiawan, politikus dan juga elit PKT belajar dari pengalaman tersebut dan melakukan beberapa perubahan yang tercetus dalam Reformasi Ekonomi tahun 1978. Disitulah sebenarnya yang menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Tiongkok dan sekaligus menandai proses penyesuaian PKT terhadap perkembangan ekonomi dunia.

Dari itu semuanya, Tiongkok pada dasarnya telah berubah. Tiongkok tidak lagi seperti negara Komunis yang nampak pada masa Mao Ze Dong berkuasa. Tiongkok telah memiliki wajah baru yang berbeda. Tiongkok telah muncul menjadi satu kekuatan ekonomi besar dunia namun dengan sistem politik Komunis. Tiongkok

Juga kemudian memunculkan kekhawatiran bagi negara-negara lain atas kemajuan ini. Filsafat Konfusianisme yang dipegang oleh masyarakat Tiongkok juga turut mempengaruhi perkembangan ini dalam konteks tertentu. Yang dilakukan oleh Tiongkok pada dasarnya adalah mencoba untuk memanfaatkan globalisasi dengan tetap mempertahankan jati diri yang dimiliki. Meskipun disisi lain, perkembangan Republik Rakyat Tiongkok ini juga tidak tanpa kritik. Politik yang kaku, isu kerusakan lingkungan, isu pelanggaran HAM, isu Tibet dan isu keadilan sosial ekonomi yang tidak merata, muncul dan mendapatkan banyak protes dari berbagai kalangan.

Setidaknya, Republik Rakyat Tiongkok telah berhasil menunjukkan sebuah model yang berbeda dari yang lain. Model

sebuah negara dengan dua sistem yang secara teoritis berada pada jalur yang berbeda. Namun tentu saja, akan ada katalisator yang mendamaikan dua teori ini dalam penerapannya, yaitu kelompok cendekiawan dan ilmuwan atau disebut dengan kelompok intelektual. Tulisan dalam buku ini akan memberikan gambaran bagaimana sebenarnya kelompok intelektual di Tiongkok sangat berpengaruh dalam perubahan, dan hal ini telah terjadi bukan pada masa modern saat ini, namun telah terjadi dan dimulai sejak ribuan tahun yang lalu di Tiongkok. Tentu akan bermanfaat bagi negara yang berkembang lainnya kalau para intelektual diberi pengaruh dalam pembangunan negerinya.

Buku ini adalah hasil perenungan dan diskusi penulis, sangat menarik karena ditulis oleh seorang yang berlatar belakang Tionghoa Intelektual generasi muda Indonesia! Termasuk diskusi dengan saya sendiri yang mencoba untuk memberikan masukan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman saya dengan Tiongkok.



Los Angeles, 5 Mei 2011

**Go Hwie Khing**





# PENGANTAR

## Penulis

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang atas rahmat-Nya akhirnya penulis berhasil menyelesaikan tulisan mengenai masyarakat Tiongkok ini. Tulisan ini memiliki tujuan utama untuk menganalisa bagaimana sistem politik komunisme masih bertahan di Tiongkok sejak tahun 1949. Hal ini sangat menarik terutama jika melihat kondisi Tiongkok saat ini yang telah tumbuh menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Dalam pandangan Barat hal ini menunjukkan keanehan dimana dipercaya ketika terjadi peningkatan kondisi ekonomi terjadi pula tuntutan demokrasi dan hal ini justru kecil atau setidaknya pemerintah Komunisme di China berhasil mengaturnya dan tidak menjadi satu gerakan yang besar.

Tulisan ini disajikan dalam analisa kehidupan sosial politik masyarakat Tiongkok mulai dari masa tradisional-kekaisaran sampai kepada masyarakat Tiongkok saat ini. Tulisan ini menjelaskan bahwa keberlanjutan sistem komunisme di Tiongkok didukung oleh lima faktor. Pertama, sejak masa tradisional sampai masa modern saat ini, pola hubungan penguasa dan rakyat di Tiongkok relatif tetap meskipun rezimnya berubah. Kedua, sistem politik komunisme ternyata relatif diterima oleh kelompok masyarakat intelektual dan pedagang yang dalam kacamata teori sebenarnya dapat menjadi agen perubahan kearah demokrasi. Ketiga, pengaruh dilihat dari sudut pandang filsafat Konfusianisme. Meskipun bukan menjadi faktor utama namun budaya Konfusianisme sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial politik masyarakat Tiongkok terutama pada permasalahan penghormatan kepada pemerintah dan negara. Keempat, dalam konteks tertentu, Partai Komunis Tiongkok (PKT) telah melakukan berbagai perubahan dan penyesuaian

terhadap kondisi masyarakat. Beberapa kebijakan PKT lebih mengakomodir tuntutan kebutuhan masyarakat dan jauh berbeda dengan kebijakan pada masa Mao Ze Dong. Kelima, pengaruh dunia internasional yaitu keruntuhan Uni Soviet pada tahun 1989 memberikan pelajaran kepada kelompok intelektual Tiongkok untuk melakukan perubahan kearah demokrasi secara pelan-pelan agar tidak mengalami nasib yang sama dengan Uni Soviet.

Dalam penyusunan dan penulisan karya ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Malang yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Program Pasca Sarjana UMM melalui beasiswa PPS, Direktur Pasca Sarjana dan Ketua Program Magister Sosiologi, Dr. Vina Salviana, DS, M.Si, Dekan FISIP UMM, Dr.Wahyudi, M.Si, serta teman-teman di Jurusan Hubungan Internasional UMM, Dyah Estu, Victory Pradhitama, Gonda Yumitro, Ruli Inayah, Syafrin Zahidi, M. Qobith dan Amaria Qori, serta teman-teman Idin Fasisaka, MA dan Yusli Effendi, MA.

Untuk segala waktu dan bimbingan yang diberikan selama penelitiannya, secara khusus penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. HM. Mas'ud Said, Ph.D dan Himawan Bayu Patriadi, Ph.D, Bapak Go Hwie Khing dari United States Asia Chamber of Commerce yang berkenan meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan pengantar pada tulisan ini, Kedutaan Besar Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Konsulat Jenderal RRT di Surabaya, Ms. Xu Lian, Dr. Arif Budi, Eby Hara, Ph.D dan Agustrihartono MA, serta Pak Nurudin M.Si yang memberikan banyak pencerahan dan dukungan kepada penulis untuk terus berkarya.

Tidak lupa penulis mengucapkan terimakasih kepada teman-teman di Magister Sosiologi angkatan 2006, Pusat Kajian Asia Timur (*Centre for East Asia Studies/CEAS*) Hubungan Internasional UMM dan mahasiswa Hubungan Internasional UMM, dan kepada Papa, Bunda dan Debby Rakhmawati atas dukungan selama penulis melakukan penelitian dan pelaporan hasil penelitian. Semoga

karya kecil ini dapat bermanfaat bagi studi sosiologi politik dan hubungan internasional.

Malang, Desember 2010

**Tonny Dian Effendi**





# DAFTAR ISI

## PENGANTAR

<i>Prof. Mas'ud Said, P.hD</i> .....	
<i>Bapak Go Hwie Khing</i> .....	
<i>Penulis</i> .....	

DAFTAR ISI .....	
------------------	--

DAFTAR TABEL .....	
--------------------	--

DAFTAR GAMBAR .....	
---------------------	--

## I

PENDAHULUAN .....	
-------------------	--

## II

PENDEKATAN SOSIOLOGI POLITIK .....	
------------------------------------	--

Sistem Sosial.....	
Sosiologi Politik.....	
Sosialisme .....	
Sistem Politik Sosialisme.....	
Komunisme .....	
Negara Sosialis ditengah Ekonomi Kapitalis.....	
Teori Konflik Dahrendorf .....	
Teori Elit .....	

## III

MAO ZE DONG DALAM SOSIALISME TIONGKOK.....	
--	--

Sejarah Mao Ze Dong .....	
Pandangan Mao terhadap Kelas dalam Masyarakat Tiongkok.....	
Pandangan Mao tentang Marxisme.....	
Pandangan Mao tentang Liberalisme .....	
Pandangan Mao tentang Pembangunan Komunisme .....	

di Tiongkok .....	
Pandangan Mao tentang Perubahan Sosial	
Masyarakat Tiongkok.....	
Kesimpulan .....	

## IV

### MASYARAKAT TIONGKOK

SEBELUM REVOLUSI KOMUNISME .....	
Keluarga dalam Masyarakat Tradisional Tiongkok .....	
Petani Tuan Tanah dan Birokrasi .....	
Sektor Pertanian dalam Perubahan Masyarakat .....	
Simbiosis Mutualisme Tuan Tanah dan Birokrasi	
di Tiongkok .....	
Persinggungan dengan negara Barat .....	
Kuomintang dan Revolusi 1911 .....	
Filsafat Dalam Masyarakat Tiongkok	
Kesimpulan .....	

## V

### PERKEMBANGAN POLITIK

DAN HUBUNGAN RAKYAT-PENGUASA .....	
Perkembangan Politik Pada Masa Kerajaan .....	
Perkembangan Politik Sebelum RRT .....	
• Politik masa Dr. Sun Yat Sen.....	
• Politik masa Chiang Kai Sek .....	
• Politik masa Mao Ze Dong .....	
• Politik masa Deng Xiao Ping.....	
Hubungan Rakyat – Penguasa .....	
• Hubungan Petani dan Penguasa .....	
• Hubungan Buruh – Penguasa.....	
• Hubungan Kelompok Intelektual – Penguasa .....	

## VI

### RESPON PARTAI KOMUNIS TIONGKOK

TERHADAP PERUBAHAN KONDISI DI TIONGKOK .....	
Budaya Politik Masyarakat Tiongkok.....	
Struktur Pemerintahan Republik Rakyat Tiongkok .....	
Struktur Politik Republik Rakyat Tiongkok.....	

Hubungan PKT dan Pemerintah .....	
Politik di Tiongkok pasca Deng Xiao Ping.....	
Respon PKT terhadap Perubahan Politik di Tiongkok .....	
• Kondisi PKT pasca Reformasi (Pasca 1978) .....	
• Perubahan dalam Proses Pengambilan Kebijakan .....	
• Sistem Kerjasama Multipartai .....	
• Sistem Pemilihan Umum di Tiongkok .....	
<b>VII</b>	
<b>MASYARAKAT TIONGKOK SEKARANG</b>	
<b>DAN KEMAJUAN EKONOMI .....</b>	
Globalisasi dan Reformasi Ekonomi Tiongkok .....	
Kelas Sosial Baru .....	
Permasalahan Petani.....	
Lapangan Kerja dan Perusahaan Asing.....	
Korupsi .....	
<b>VIII</b>	
<b>PENUTUP .....</b>	
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>ISTIAH PENTING.....</b>	
<b>INDEKS .....</b>	
<b>TENTANG PENULIS.....</b>	



# DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Perbandingan Perubahan Masyarakat Feodal di Tiongkok dan Eropa Barat ~
- Tabel 4.2 Perbandingan Masyarakat Agraris dan Pedagang di Tiongkok Tradisional~
- Tabel 4.3 Perbandingan Proses Perubahan Sistem Imperial di Eropa (Inggris) dan Tiongkok~
- Tabel 4.4 Perjanjian Tiongkok dengan Negara Barat Menjelang Revolusi 1911~
- Tabel 4.5 Negara dan Jumlah Daerah Konsesi di Tiongkok~
- Tabel 5.1 Perubahan Sistem Politik Pemerintahan Pasca Mao~
- Tabel 5.2 Pergolakan Reformasi di Tiongkok antara kelompok Pemimpin Tua dan Elit Demokratis~
- Tabel 5.3 Empat Tipe Karakter Moral Pemimpin Lokal~
- Tabel 6.1 Struktur Pemerintahan dan partai pada Pemerintahan Hu Jintao~
- Tabel 6.2 Komposisi Deputi pada NPC ke XX~
- Tabel 6.3 Dua Model Kepemimpinan Tiongkok~
- Tabel 7.1 Evolusi Ideologi di Tiongkok tahun 1978-2003~
- Tabel 7.2 Evolusi Sistem Ekonomi di Tiongkok~
- Tabel 7.3 Proporsi Kekacauan dan Penduduk di Tiga Wilayah Besar Tiongkok tahun 1992~
- Tabel 7.4 Kasus Korupsi oleh Kader, 1992-1998~
- Tabel 7.5 Pejabat Tinggi yang Terbukti Korupsi dan Hukuman yang Diterima~





# DAFTAR GAMBAR

- Gambar 2.1 Hubungan Saling Ketergantungan dalam Sistem~
- Gambar 2.2 Alur Teori Konflik Dahrendorf~
- Gambar 3.1 Struktur Konflik Partai Nasionalis dan PKT dalam Perang Jepang-Tiongkok~
- Gambar 3.2 Garis Massa Mao~
- Gambar 3.3 Dua Opini dalam PKT ~
- Gambar 3.4 Kelas Sosial dalam Masyarakat Tiongkok~
- Gambar 3.5 Perubahan Masyarakat Tiongkok dari Feodal ke Semi-Kolonial~
- Gambar 3.6 Perubahan Struktur Masyarakat Tiongkok dari Faodal ke Semi Feodal ~
- Gambar 4.1 Struktur Masyarakat Tiongkok pada masa Feodal~
- Gambar 4.2 Hubungan petani, tuan tanah, aristokrat dan birokrasi~
- Gambar 4.3 Hubungan perjanjian sewa antara petani dan tuan tanah~
- Gambar 4.4 Perbandingan Hubungan Sistem Imperial dan Masyarakat di Eropa dan Tiongkok~
- Gambar 5.1 Dasar Rekonstruksi Nasional Dr. Sun Yat Sen
- Gambar 5.2 Konsep Demokrasi Dr. Sun Yat Sen~
- Gambar 5.3 Konsep Kebebasan Masyarakat-Individu, Negara dan Hak Politik Individu~
- Gambar 5.4 Pola Restrukturisasi Sosial-Politik di awal RRT
- Gambar 5.5 Sistem Kerja Komune~
- Gambar 5.6 Struktur Organisasi Sebuah *Xiang* di Desa~
- Gambar 5.7 Pola Perlawanan Petani~

- Gambar 5.8 Struktur Kota Tiongkok tahun 1949-1980~
- Gambar 5.9 Tiga Ketergantungan Buruh dalam *Organized Dependence*~
- Gambar 5.10 Peran Kelompok Intelektual dalam Demokrasi masa awal Republik~
- Gambar 6.1 Pembangunan Budaya Politik oleh Mao yang dipengaruhi Konfusianisme~
- Gambar 6.2 *Chinese Political Culture : Support for Democratic value in PRC, Taiwan And Hong Kong*~
- Gambar 6.3 Struktur Republik Rakyat Tiongkok~
- Gambar 6.4 *The Composition of special committees under the National People's Congress*~
- Gambar 6.5 Sistem Nomenklatura pada hubungan PKT dan Struktur Politik~
- Gambar 6.6 *Top Party and Government Executives, 1949-2003*~
- Gambar 6.7 *Policymaking in Post-Mao China*~
- Gambar 6.8 Sistem Multipartai dalam Sistem Politik Tiongkok~
- Gambar 7.1 *Growing Out of the Plan : Percentage Contributed to Total Value of Industrial Output, by Structure of Ownership and Management 1980-2000*~

# I PENDAHULUAN

Perkembangan dunia sekarang ini telah mengarah kepada kapitalisme global dimana arus perdagangan, informasi dan teknologi informasi semakin berkembang pesat, meluas dan merambah setiap pelosok dunia. Ohmae menyebutkan dalam era globalisasi sekarang sebagai efek globalisasi adalah dunia yang tanpa batas (*borderless*) dimana ditandai dengan arus penyebaran yang sangat pesat dari unsur 4 I, yaitu investasi, informasi, industri dan individu<sup>1</sup>. Perkembangan empat I ini telah melampaui batas-batas negara, bahkan melampaui konsep-konsep blok pembangunan dan negara-negara tidak bisa lagi tertutup seperti Tiongkok pada era 1960an. Disinilah dalam lingkup nasional, peran negara semakin tergantikan oleh peran-peran aktor non negara yang menjalankan berbagai kepentingan dan aktivitas ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Sementara itu, meskipun Perang Dingin telah berakhir ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet dan Tembok Berlin pada tahun 1989, namun beberapa faham Sosialisme masih dianut di beberapa negara, dan sistem masyarakat Sosialis juga masih diterapkan. Runtuhnya Uni Soviet seringkali diartikan sebagai suatu babak baru dalam perkembangan dunia dimana bahkan ada yang menganggap masa setelah Perang Dingin adalah masa berakhirnya sejarah yang ditandai dengan kemenangan Kapitalisme seperti yang digambarkan oleh Francis Fukuyama<sup>2</sup>. Dengan perubahan

---

<sup>1</sup> Kenichi Ohmae, 2002, *Hancurnya Negara Bangsa : Bangkitnya Negara Kawasan dan Geliat Ekonomi Regional di Dunia Tak Terbatas*, Yogyakarta, Qalam, hal. xv.

<sup>2</sup> Council on Foreign Relations, 2005, *Amerika dan Dunia : Mempertentangkan*

dalam dunia internasional ini kemudian kelompok Liberalisme-Kapitalisme yang dianggap sebagai pemenang dalam konflik ideologis yang berlangsung selama kurang lebih dua dekade memiliki kekuatan pengaruh yang cukup kuat dinegara-negara didunia. Arus pengaruh ini disertai dengan perkembangan teknologi dan informasi sehingga pengaruh yang berkembang tidak hanya pada tataran fisik seperti melimpahnya arus barang dan jasa serta industrialisasi di beberapa negara, melainkan juga menyebarkan ide dan ideologi tentang kemakmuran yang pada dasarnya merupakan janji atau impian utama Kapitalisme.

Perubahan yang kemudian terjadi dalam sistem internasional adalah munculnya masyarakat dunia yang menjadi saling terkait dan saling tergantung satu sama lain. Interdependensi inilah yang akhirnya mendorong munculnya jaringan kapitalisme didunia yang didominasi oleh negara-negara industri besar seperti Amerika Serikat, Jepang dan beberapa negara Eropa Barat. Jaring-jaring Kapitalisme ini juga diikuti dengan masuknya beberapa negara dikawasan Asia Timur dan Amerika Latin. Di Asia Timur beberapa kawasan seperti Singapura, Taiwan, Korea Selatan dan Hongkong. Kondisi seperti inilah yang kemudian menjadikan beberapa negara Komunis pasca Perang Dingin menjadi seolah-olah “terkepung” dengan jaringan Kapitalisme dunia. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana selanjutnya nasib negara-negara komunis lainnya seperti Tiongkok, Kuba dan beberapa negara di Eropa Timur dan Afrika seperti Tanzania dan Mozambique. Apakah mereka akan tetap mempertahankan ideologi mereka pada tataran politik dan ekonomi? Hal ini menjadi suatu pilihan bagi mereka untuk tetap mempertahankan kebijakan secara ketat menutup diri atau mulai membuka diri dengan melakukan beberapa kompromi terhadap kondisi dunia yang semakin Kapitalistik.

Dalam sistem masyarakat Sosialis yang masih berlangsung hingga saat ini di beberapa negara dunia, peran negara begitu penting dalam melaksanakan tugas pembagian kerja bersama dan

---

*Bentuk Baru Politik Internasional (terjemahan)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 32-33.



pemanfaatan sumber daya yang ada untuk kepentingan nasional, kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Beberapa negara yang masih menerapkan sistem masyarakat sosialis diantaranya adalah di Tiongkok di Asia, Kuba di Amerika. Kedua negara ini berada pada benua yang berbeda dan mempertahankan sistem masyarakat Sosialis.

Pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana negara ini menanggapi perkembangan sistem global yang semakin Kapitalistik ini? Bagaimanakah kemudian perubahan yang terjadi pada *structure of power*, *distribution of power* dan *basic of power* di Tiongkok? Lalu bagaimanakah mereka melakukan kompromi terhadap kondisi global yang ada?

Tiongkok merupakan negara dengan penduduk terbesar didunia dengan data terakhir menunjukkan jumlah penduduk Tiongkok telah mencapai 1,3 milyar jiwa. Tiongkok merupakan salah satu peradaban tertua didunia setelah peradaban Mesopotamia maupun Maya, hampir selama 2000 tahun, Tiongkok menganut faham Konfusianisme dan berbentuk kerajaan. Peradaban itu kemudian juga ditambah dengan perdagangan yang mencapai kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan maupun Asia Tengah. Salah satu yang terkenal adalah penjelajahan samudera yang dilakukan oleh Cheng Ho dan munculnya Jalur Sutra ke Barat menuju India.

Sejalan dengan usianya yang telah mencapai ribuan tahun, Tiongkok menjadi sebuah negara baru pada tahun 1949 ketika Mao Ze Dong memproklamkan berdirinya Republik Rakyat Tiongkok (*People Republic of China/PRC*). Namun sebelumnya, rakyat Tiongkok telah meninggalkan sistem kerajaan setelah terjadi Revolusi yang dipimpin oleh nasionalis Dr. Sun Yat Sen pada tahun 1911 yang merubah kerajaan menjadi sebuah negara nasionalis Republik Tiongkok. Namun Pasca Perang Dunia II, terjadi Perang Saudara antara kelompok nasionalis (*Kuo Min Tang*) dengan kelompok komunis (*Kuo Chan Tang*) yang akhirnya dimenangkan oleh kelompok komunis dan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Sedangkan kelompok nasionalis melarikan diri ke pulau Taiwan

dan mendirikan negara baru yaitu Republik Tiongkok (*Republic of China / RoC*).

Beberapa kejadian penting yang akan dijadikan fokus analisa dalam penelitian ini adalah pada struktur kekuasaan pada masyarakat Tiongkok pada masa kerajaan (masa kekaisaran terakhir), revolusi 1911, pemerintahan Mao Ze Dong (1949) dengan beberapa kebijakannya yang terkenal seperti revolusi budaya dan lompatan jauh kedepan atau *the great leap forward*, masa *The Gang Four* dan pemerintahan Deng Xiao Ping serta masa Pasca Perang Dingin 1989.

Telaah perubahan struktur kekuasaan dalam masyarakat menjadi penting ketika kita ingin menganalisa bagaimana perubahan bisa terjadi dalam masyarakat. Begitu pula dalam masyarakat Tiongkok yang menghadapi globalisasi saat ini, mereka telah beberapa kali mengalami perubahan struktur kekuasaan yang berpengaruh terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan partai. Kebijakan inilah yang pada tataran implementasinya berpengaruh langsung terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Tiongkok berkembang menjadi negara industri besar di Asia dengan pertumbuhan ekonomi tinggi. Secara ekonomi, jumlah penduduk yang besar sekaligus wilayah yang luas merupakan modal ekonomi yang sangat potensial untuk mengembangkan industri. Jika dibandingkan dengan Kuba, Kuba merupakan negara yang revolusioner yang berada didekat Amerika Serikat secara geografis namun mencoba mempertahankan sistem sosialis dengan jalur politiknya.

Sosialisme dan Komunisme memiliki definisi yang berbeda. Sosialisme lebih diartikan sebagai *to each according to work, from each according to ability*, sedangkan komunisme diartikan sebagai *to each according to need, from each according to ability*<sup>3</sup>. Dalam sistem masyarakat Sosialis sendiri, seperti yang dikemukakan oleh Rothchild dan Foley dalam penelitiannya di Afrika menyatakan bahwa diantara beberapa karakteristik masyarakat sosialisme adalah komitmen pada penguatan negara, lebih terbuka dalam

---

<sup>3</sup> Leslie Sklair, 1991, *A Sociology of the Global System*, New York, Simon & Schuster International Group, hal. 171.

menerima transformasi yang membawa tatanan sosial baru, penggunaan koersi jika diperlukan untuk meminimalisir tekanan asing yang membawa faham Kapitalisme dan komitmen untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang sedemikian rupa untuk kesejahteraan dan kejayaan Sosialisme<sup>4</sup>. Dalam definisi ini kita bisa melihat terdapat beberapa unsur utama yaitu negara, keterbukaan terhadap tatanan baru dan penciptaan kondisi ekonomi dan sosial.

Disinilah kemudian pertentangan terjadi ketika sistem kapitalisme global yang didalamnya membawa efek psikologi konsumerisme menerapkan *image* yang telah sukses di beberapa negara yaitu "hidup yang lebih baik" yang bertentangan dengan prinsip Sosialisme yaitu "masyarakat yang lebih baik". Terdapat pertentangan antara konsep individu dan masyarakat secara komunal disini. Disisi lain, perkembangan Kapitalisme global telah memunculkan faham baru dimana negara harus "dihilangkan" dari urusan ekonomi, yaitu faham neoliberalis. Kedatangan Neo-liberalisme dinegara-negara dunia ketiga ditunjukkan dengan membawa faham pasar bebas dan janji kemakmuran yang pada dasarnya menurut penentang faham ini, yang terjadi adalah pembentukan perekonomian global dipimpin yaitu dipimpin oleh negara-negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi besar<sup>5</sup>.

Aktor yang berpengaruh dalam mengglobalkan faham ini dan kemudian banyak berpengaruh pada perubahan ekonomi dan sosial bahkan politik di negara dunia ketiga adalah TNC atau *transnational corporation*. TNC menurut Lairson dan Skidmore adalah agen globalisasi dimana menerapkan lima elemen dasar globalisasi yaitu pertumbuhan yang sangat cepat dalam transaksi pembayaran atau keuangan internasional, perdagangan antar perusahaan, investasi asing (FDI), munculnya pasar global dan sistem nilai jual produk secara global dan meningkatkan penggunaan dan penemuan komunikasi dan transportasi global<sup>6</sup>. Begitu kuatnya pengaruh

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal. 172.

<sup>5</sup> I Wibowo dan Francis Wahono, Eds, 2003, *Neoliberalisme*, Yogyakarta, Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, hal. 5-6.

<sup>6</sup> Yulius P Hermawan, Ed., 2007, *Transformasi dalam Studi Hubungan*

TNC yang membawa globalisasi dan di beberapa kasus membawa perubahan sosial yang luar biasa sehingga David Korten dalam bukunya *When Corporate Rule the World*, menyatakan bahwa TNC bagaikan pelaku kesewenang-wenangan pasar yang memperluas pasar diseluruh dunia bagaikan penyakit kanker<sup>7</sup>.

Globalisasi sebagai sebuah peradaban baru telah pula berusaha untuk “memberadatkan” peradaban yang lainnya. Namun dalam belahan dunia yang lainnya ternyata masih ada beberapa negara yang mampu mempertahankan sistem sosialismenya meskipun tanpa dapat dipungkiri juga terdesak oleh arus globalisasi sistem kapitalisme dunia. Tiongkok adalah salah satu negara yang mencoba mempertahankan sistem masyarakat sosialis ditengah pembangunan ekonomi yang mau tidak mau mereka harus berkompromi dengan sistem global yang kapitalistik. Tiongkok mencoba mencari jalan tengah ketika arus globalisasi melanda yang ditandai dengan masuknya investasi asing oleh MNC/TNC yang tidak hanya membawa arus barang dan jasa, namun juga membawa ide, ideologi Kapitalisme. Melihat Tiongkok yang berkompromi dengan globalisasi ekonomi dimana kemudian muncul pertanyaan apakah memang Tiongkok sedang dalam perubahan dengan memberikan kapitalisme masuk atau memang hal itu terjadi memang karena kebutuhan ekonomi Tiongkok?

Studi tentang masyarakat Sosialis dan perubahannya di Tiongkok ini akan menarik karena pada dasarnya memiliki karakteristik dan sejarah yang unik terkait dengan geopolitik dan geo ekonomi karena secara geopolitik, secara geografi Tiongkok adalah salah satu negara yang berideologi komunis dimana Barat atau Amerika Serikat membangun kebijakan *containmen policy* atau politik pembendungan pada masa Perang Dingin. Sehingga saat ini Tiongkok dikelilingi oleh negara-negara liberal dan bercirikan pembangunan ekonomi kapitalistik seperti Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Sedangkan secara geoekonomi, posisi Tiongkok yang dikelilingi oleh negara kapitalistik Asia Timur ini membuat posisi

---

*Internasional : Aktor, Isu dan Metodologi*, Bandung, Graha Ilmu, hal. 217.

<sup>7</sup> David Korten, 2002, *The Post Corporate World : Kehidupan Setelah Kapitalisme (Terjemahan)*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, hal. 16-17.

Tiongkok dalam kacamata ekonomi, mau tidak mau harus turut serta dalam perkembangan regional dimana sedang berlangsung proses globalisasi ekonomi. Tulisan ini setidaknya akan menunjukkan bagaimanakah negara yang masih mempertahankan sistem masyarakat Sosialis mampu bertahan dan bersaing dengan negara lain yang lebih kapitalistik ditataran internasional sementara itu ditataran nasional mereka mau tidak mau juga harus berkompromi dengan investasi asing dari agen globalisasi yaitu TNC. Serangan dari luar dan dalam ini tentu saja akan membawa banyak perubahan dalam sistem sosial, ekonomi dan politik. Penelitian ini berdasar pada perubahan yang terjadi dalam masyarakat Tiongkok mulai masa sebelum revolusi 1911, revolusi 1949, masa Mao Ze Dong, revolusi budaya, *the great leap foward*, masa Deng Xiao Ping dan pasca Perang Dingin untuk mengetahui perubahan dalam struktur, basis dan distribusi kekuasaan (*power*) yang akhirnya sampai saat ini masih mempertahankan sistem sosialisme.

Tulisan ini hendak menceritakan tentang perkembangan masyarakat Tiongkok dilihat dari aspek Sosiologi Politik. *Pertama*, tulisan ini terutama ditujukan untuk menyusun pemetaan terhadap struktur kekuasaan dalam masyarakat Tiongkok semenjak masa revolusi 1911, pemerintahan Mao, The Gang Four, Deng Xiao Ping dan Pasca Perang Dingin. Perubahan struktur kekuasaan ini sangat penting karena pada dasarnya aktor-aktor kunci dalam politik di Tiongkok memiliki basis kekuasaan yang berbeda sehingga untuk mendapatkan dukungan mayoritas maka harus mengadakan hubungan dengan aktor-aktor yang lain. Perubahan struktur dan basis kekuasaan pada masing-masing periode kekuasaan di Tiongkok akan memberikan sebuah gambaran tentang hubungan masing-masing periode dan kemudian dapat menjelaskan bagaimana sebuah sistem politik mampu bertahan ditengah perubahan masyarakat.

*Kedua*, berusaha untuk mendapatkan keterkaitan antara perubahan struktur kekuasaan terhadap perubahan perilaku sosial politik masyarakat Tiongkok karena setiap perubahan struktur politik membawa implikasi terhadap perubahan dalam masyarakat. Dalam hal ini yang menjadi menarik adalah ketika



struktur kekuasaan menempatkan faktor ekonomi menjadi penting pada masa Deng Xiao Ping maka basis kekuasaannya bertambah berasal dari golongan pedagang dan swasta. Oleh karena, itu perubahan yang terjadi adalah sistem sosialis Tiongkok yang berbasis pada petani, mulai bergeser karena kebijakan Deng lebih kepada pembangunan sistem ekonomi yang cenderung mengarah kepada ekonomi pasar.

*Ketiga*, berusaha mengetahui pola hubungan antara penguasa dan rakyat dengan analisa sosiologi politik sehingga pada akhirnya dapat mengetahui bagaimanakah masyarakat sosialis Tiongkok menghadapi globalisasi saat ini dan struktur kekuasaan yang seperti apa yang sekarang sedang berlangsung dan diharapkan dapat menghadapi globalisasi ekonomi.

Selain beberapa tujuan diatas, tulisan ini dalam tataran akademik ingin menghasilkan sebuah analisa tentang bagaimana masyarakat Tiongkok membangun negaranya dalam perjalanan politik yang panjang. Tiongkok selama sekitar dua puluh tahun membangun ekonominya dengan sistem kapitalis namun masih mempertahankan sistem komunisme pada politiknya. Hal ini menjadi penting dalam tataran perbandingan politik ketika kita memperhatikan pengalaman beberapa negara komunis seperti Yugoslavia dan Jerman Timur. Tentu saja pengalaman Tiongkok ini sangat menarik untuk dikaji dimana secara geografis Tiongkok berada dalam kawasan pembangunan ekonomi Kapitalis Asia Timur.

Berdasarkan bidang kajian keilmuan penulis, tulisan ini juga ditujukan untuk memperkaya wawasan atas dua hal. Pertama, secara sosiologis dapat melihat bagaimana proses legitimasi kekuasaan di Tiongkok dengan melihat perkembangan masyarakatnya. Kedua, melihat secara lebih jauh tentang bagaimana pengaruh faktor politik domestik dan internasional terhadap bagaimana negara berperilaku dalam lingkup domestik yang pada akhirnya akan juga mempengaruhi bagaimana Tiongkok akan berperilaku dalam hubungannya dengan aktor lain dalam hubungan internasional baik aktor negara dan non negara.